BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Surat dakwaan adalah surat yang sangat penting kedudukannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Memperhatikan fungsinya yang sedemikian penting itu, maka dapat dikatakan bahwa surat dakwaan menduduki posisi yang sangat pokok dalam proses penyelesaian perkara pidana di sidang pengadilan.

Bahkan karena sedemikian pentingnya fungsi surat dakwaan itu dalam proses pidana, maka dikatakanlah bahwa kedudukan Jaksa secara formil sebagai peletak dasar (*Grondleger*) dan proses pidana.¹

Sebagai suatu akta, sebuah surat dakwaan mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam proses pidana.

Fungsi surat dakwaan antara lain merupakan sarana bagi Hakim dan juga terdakwa untuk mengetahui perbuatan apa yang dituduhkan kepada terdakwa.

Sedangkan bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara, karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum dapat meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan.

¹ A .Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta 172), hlm.72.,

Fungsi surat dakwaan sebagai dasar dan sekaligus menentukan batas-batas ruang lingkup pemeriksaan.

Mengingat pentingnya kedudukan surat dakwaan tersebut, penuntut Umum sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh undang—undang untuk membuat surat dakwaan dituntut agar benar—benar cermat dalam menyusun surat dakwaan. Oleh karena itu uraian yang cermat dan jelas sangat dibutuhkan guna kelancaran pemeriksaan, sekaligus untuk menghindari kemungkinan batal nya surat dakwaan tersebut.

Seperti yang baru-baru ini terjadi dalam perkara dugaan korupsi oleh tiga orang Hakim Agung di dua pengadilan negeri di Jakarta. Dua diantara Hakim Agung tersebut, Ny.Marnis Kahar, SH dan Ny. Supraptini Sutarto, SH., dihentikan pemeriksaannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara dugaan korupsi ini pada tingkat pertama, dikarenakan surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim. Sementara seorang terdakwa lain, yang juga seorang hakim agung yang saat ini telah pensiun, perkaranya juga harus dihentikan karena majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusan selanya memutuskan penetapan *Niet Otvankelijk Verklaard*² atas surat dakwaan untuk terdakwa Yahya Harahap,SH.

² *Niet Otvankelijk Verklaard* bila kita lihat artinya dalam kamus hukum Belanda, Indonesia, Inggris yang diterbitkan oleh Aneka Ilmu dapat diartikan surat dakwaan tidak dapat diterima dalam bahasa indonesia.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi studi kasus adalah kasus dakwaan. batal demi hukum terhadap terdakwa Ny.Marnis Kahar pada proses pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kasus ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih mendalam karena terdakwa dalam kasus ini adalah seorang Hakim Agung yang masih aktif dan diduga telah menerima suap pada perkara perdata pada tingkat kasasi dimana ia dan Ny.Supraptini menjadi Hakim Anggota serta Yahya Harahap sebagai Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut.

Setelah keluarnya putusan dakwaan batal demi hukum ini, di kalangan masyarakat, pengamat maupun praktisi hukum muncul pendapat—pendapat yang hampir senada, yaitu alasan Majelis Hakim yang berpendapat dakwaan jaksa penuntut *overlapping* atau berlebihan, dianggap dicari—cari dan terkesan hal ini hanyalah upaya Majelis Hakim untuk melindungi sesama Hakim, terlebih yang menjadi terdakwa adalah seorang Hakim Agung yang masih aktif dan yang menangani perkara ini adalah hakim pengadilan negeri, yang secara senioritas masih berada dibawahnya.

Dengan munculnya putusan tersebut memperkuat kesan akan adanya upaya untuk melindungi para Hakim Agung tersebut. Karena menurut Undang-undang Hakim mempunyai hak untuk memperbaiki dakwaan yang salah dan tidak harus membatalkannya begitu saja. Seperti apa yang dinyatakan oleh Muhammad Asrun koordinator Judicial Watch :³

³ Moh. Asrun, Kompas, 22 Agustus : 2001

“putusan itu membuka tabir tentang kuatnya kemungkinan konspirasi disesama hakim dan solidaritas korps yang tidak bernurani dan profesional dalam perkara ini.”

Ironis memang dimasa yang dianggap merupakan era perubahan dan pelurusan dan segala hal yang menyimpang, terutama dalam bidang hukum yang disinyalir merupakan garda terdepan penyangga proses demokratisasi di suatu negara, masih seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum yang hal ini berpengaruh buruk dalam proses penegakan hukum di era reformasi sekarang ini.

B. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

Apabila melihat dan uraian dalam latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini, yaitu :

1. Mengapa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara (No.Reg Pds 07B/Jkt. Pst/Ft.1/07/2001) Batal Demi Hukum
2. Apakah putusan hakim tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat

C. TUJUAN DAN MAFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dan penulisan karya ilmiah ini adalah

1. Untuk mengetahui Mengapa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara (No.Reg Pds 07B/Jkt.Pst/Ft.1/07/2001)Batal Demi Hukum.
2. Untuk Mengetahui apakah putusan hakim tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

D. KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEPTIONAL DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam karya tulis ini terdapat beberapa kata yang merupakan kata-kata kunci yang perlu dijabarkan secara khusus diawal karya tulis ini.

Adapun kata-kata tersebut adalah:

1. Putusan, yaitu pernyataan Hakim yang diucapkan dalam bidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam hal ini penulis menggunakan definisi putusan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai aturan atau landasan bagi praktek beracara di Indonesia dan juga merupakan acuan yang tepat bagi kita untuk mendefinisikan segala hal yang berhubungan dengan paket beracara.

2. Terdakwa, yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dituntut, diperiksa.

Dalam hal ini penulis menggunakan definisi terdakwa dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena penulis berpendapat UU No.8/131 atau KUHAP sebagai aturan atau landasan bagi praktek beracara di Indonesia merupakan acuan yang tepat bagi kita untuk mendefinisikan segala hal yang berhubungan dengan praktek beracara.

3. Surat Dakwaan, yaitu suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dan tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dan surat— surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila dianggap cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhkan hukuman.
4. *Overlapping*, menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia *overlap* berlebih; lewat batas

Dalam hal ini penulis memakai makna ‘berlebihan’ dalam hubungannya dengan surat dakwaan, sehingga dakwaan itu menjadi kabur.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴

Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dalam

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 42.

gejala yang bersangkutan.⁵ Sedangkan dari sudut tujuan, penelitian hukum terdiri dari dua, yaitu:⁶

1. Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum serta sejarah dan perbandingan hukum.
2. Penelitian hukum sosiologis/empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

Dalam penulisan ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari studi dokumen.⁷

Dalam penelitian hukum, data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya yang digolongkan menjadi:⁸

1. Bahan hukum primer:

Peraturan perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang masih berlaku. Dalam penelitian ini peraturan perundang-Undangan yang menjadi bahan kajian adalah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi Undang—Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan hukum sekunder:

⁵ Ibid.,Hlm. 43

⁶ Ibid.,Hlm. 51

⁷ Tim Pengajar Metode Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum Buku A (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000) hal. 27.

⁸ Soerjono, Op.Cit., hal. 52

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya;

3. Bahan hukum tersier:

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

Bahan-bahan tersebut digunakan dalam pencarian data penelitian ini. Sedangkan dalam segi penerapannya, penelitian ini adalah penelitian berfokus masalah, yaitu adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di Departemen Kehakiman yang melibatkan Hakim Agung Marnis Kahar. SH

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam karya tulis ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam latar belakang akan dijelaskan pentingnya kedudukan surat dakwaan dalam proses peradilan pidana, terutama untuk mencegah terjadinya pembatalan surat dakwaan.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi dan perumusan masalah dalam skripsi ini adalah munculnya keputusan surat dakwaan batal demi

hukum dalam perkara dugaan korupsi oleh Hakim Agung, dengan alasan surat dakwaan overlapping.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Sehubungan dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dan manfaat penulisan ini adalah untuk memberikan suatu analisa atas putusan Hakim yang membatalkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dugaan korupsi oleh Hakim Agung dengan alasan dakwaan overlapping, baik dan sudut teori maupun berdasarkan

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

E. Metode Penelitian

Dalam menyusun penulisan ini, akan digunakan metode normatif kualitatif, dengan jenis data primer dan sekunder.

BAB II: TEORI ATAS SURAT DAKWAAN DAN PUTUSAN PENGADILAN PINDANA

Dalam Bab kedua ini akan dibahas secara teoritis mengenai surat dakwaan, yaitu mengenai pengertian, prinsip, syarat, bentuk-bentuk surat dakwaan serta hal—hal yang diuraikan dalam surat dakwaan. Selain itu akan dijelaskan secara ringkas mengenai pengertian putusan pengadilan, jenis putusan, cara pengambilan keputusan, materi dan akibat dan putusan juga akan diuraikan dalam bab kedua tulisan ini

BAB III : PUTUSAN DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM

Dalam Bab ketiga akan dijelaskan khusus mengenai pengertian putusan dakwaan batal demi hukum, syarat—syarat, akibat serta upaya hukum terhadap putusan dakwaan batal demi hukum.

BAB IV : ANALISA PUTUSAN DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI HAKIM AGUNG MARNIS KAHAR, SH.

Bab keempat ini akan berisi tentang kasus posisi perkara dugaan korupsi Hakim Agung tersebut serta analisa penulis terhadap putusan sela Majelis Hakim yang membatalkan surat dakwaan Jaksa Penuntut dalam perkara tersebut

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini akan berisikan Kesimpulan penulis serta saran—saran atas keseluruhan isi penulisan ini.